

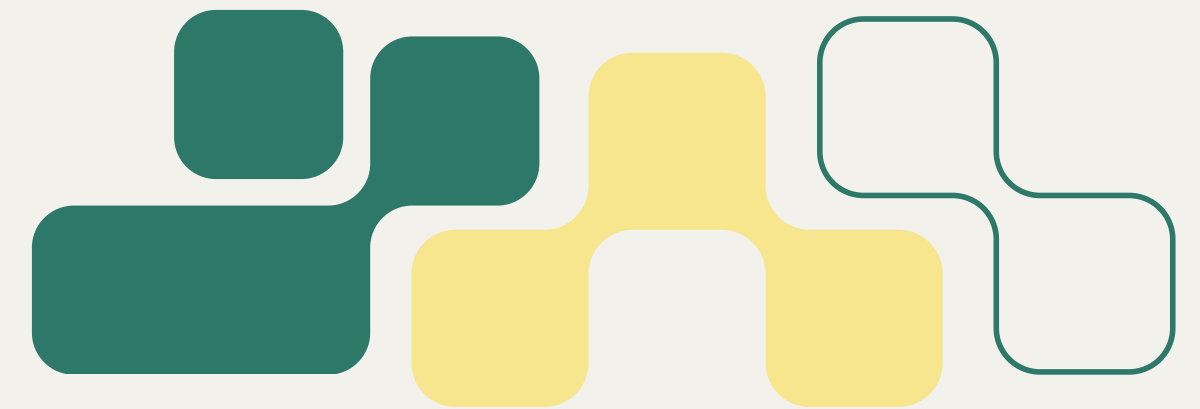
RANGKUMAN CLIMATE BUDGET TAGGING





CLIMATE BUDGET TAGGING

Budget tagging menjadi gambaran seberapa komitmen Pemerintah Kota Pekalongan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengalokasikan anggaran Daerah untuk adaptasi perubahan iklim.



Sehingga RPJMD 2025-2029 dapat terintegrasi dalam isu kajian lingkungan hidup dalam RPJMD, sehingga **ada komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran dan membuka ruang inovasi pendanaan terkait dengan implementasi rencana aksi adaptasi perubahan iklim di Provinsi Jawa Tengah.**

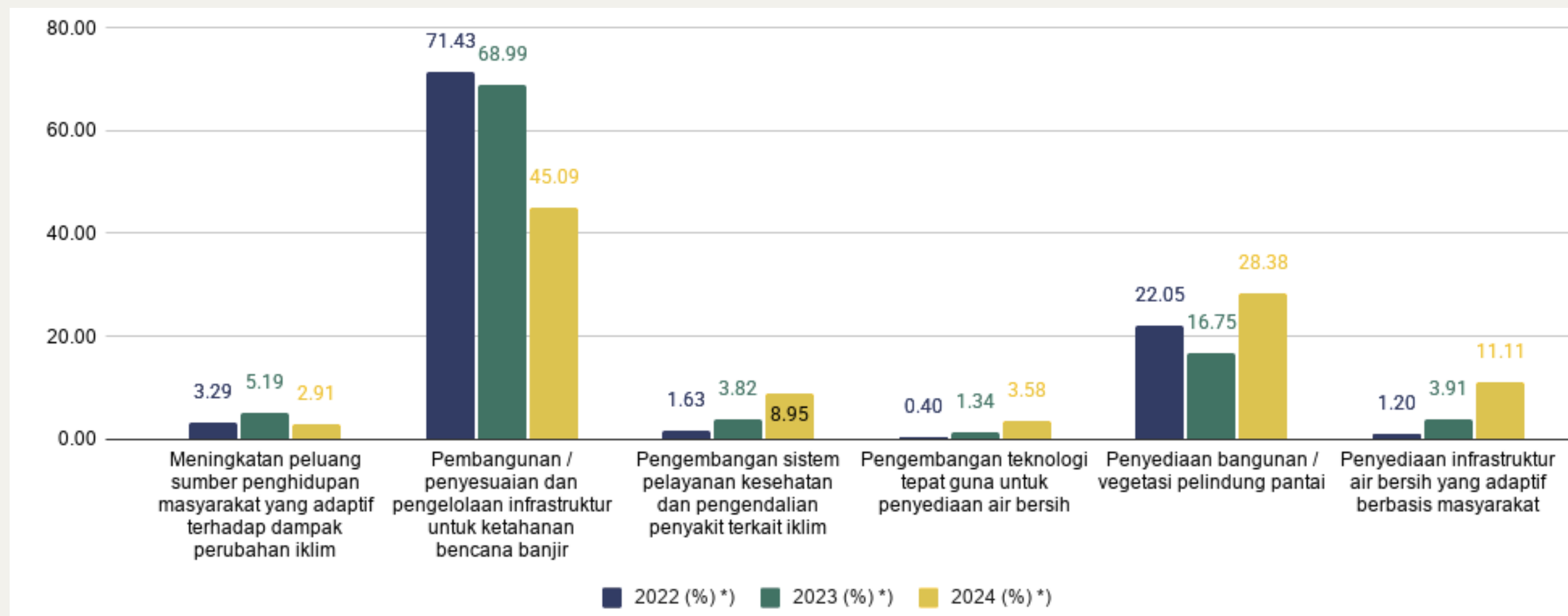
Kota Pekalongan



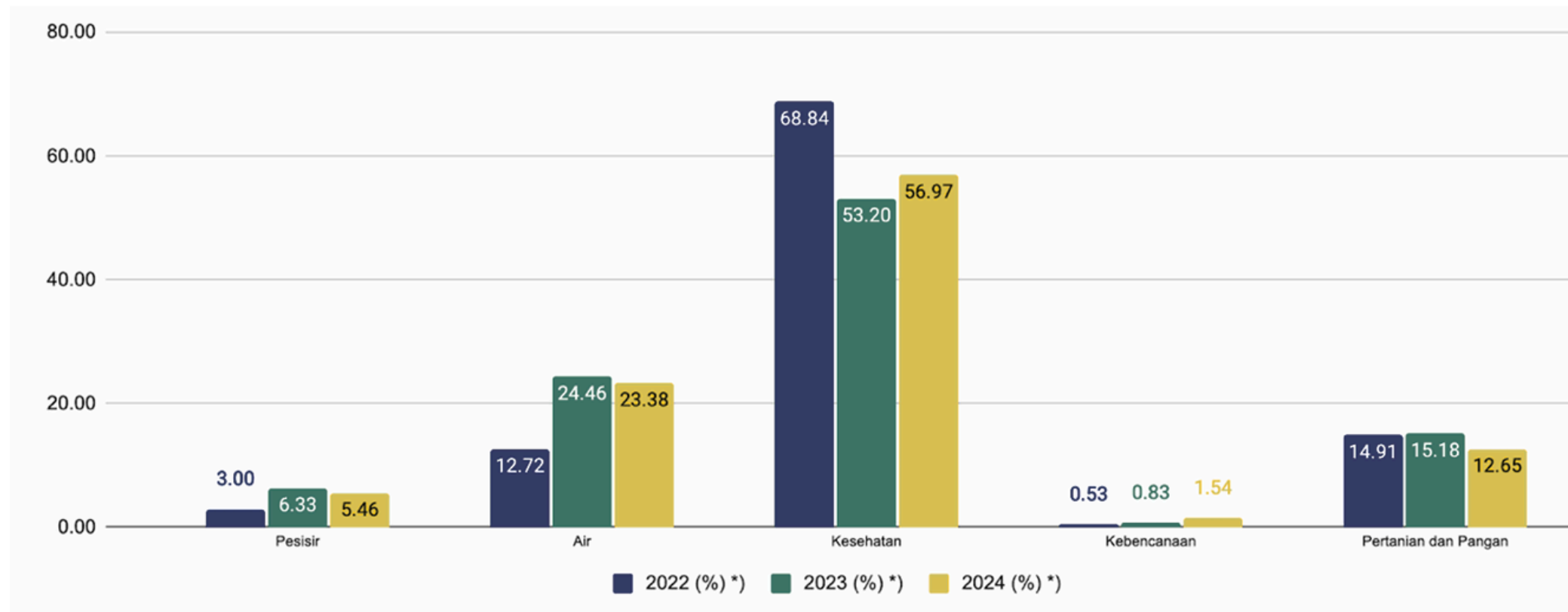
Tekanan perubahan iklim ini sangat nyata, dan dalam konteks perencanaan, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki RPPLH. **Setiap tahun pemprov menghitung D3TLH, untuk memastikan bahwa daerah masih punya kondisi lingkungan yang layak untuk hidup.**

Diharapkan seluruh POKJA PI Kota dan POKJA PI Provinsi terus bekerja keras bersama agar meningkatkan upaya aksi adaptasi perubahan iklim. CBT ini hanya tabung waktu untuk melihat apa saja yang kita alokasikan. Tetapi harus ada upaya lain dalam aksi adaptasi perubahan iklim ini.

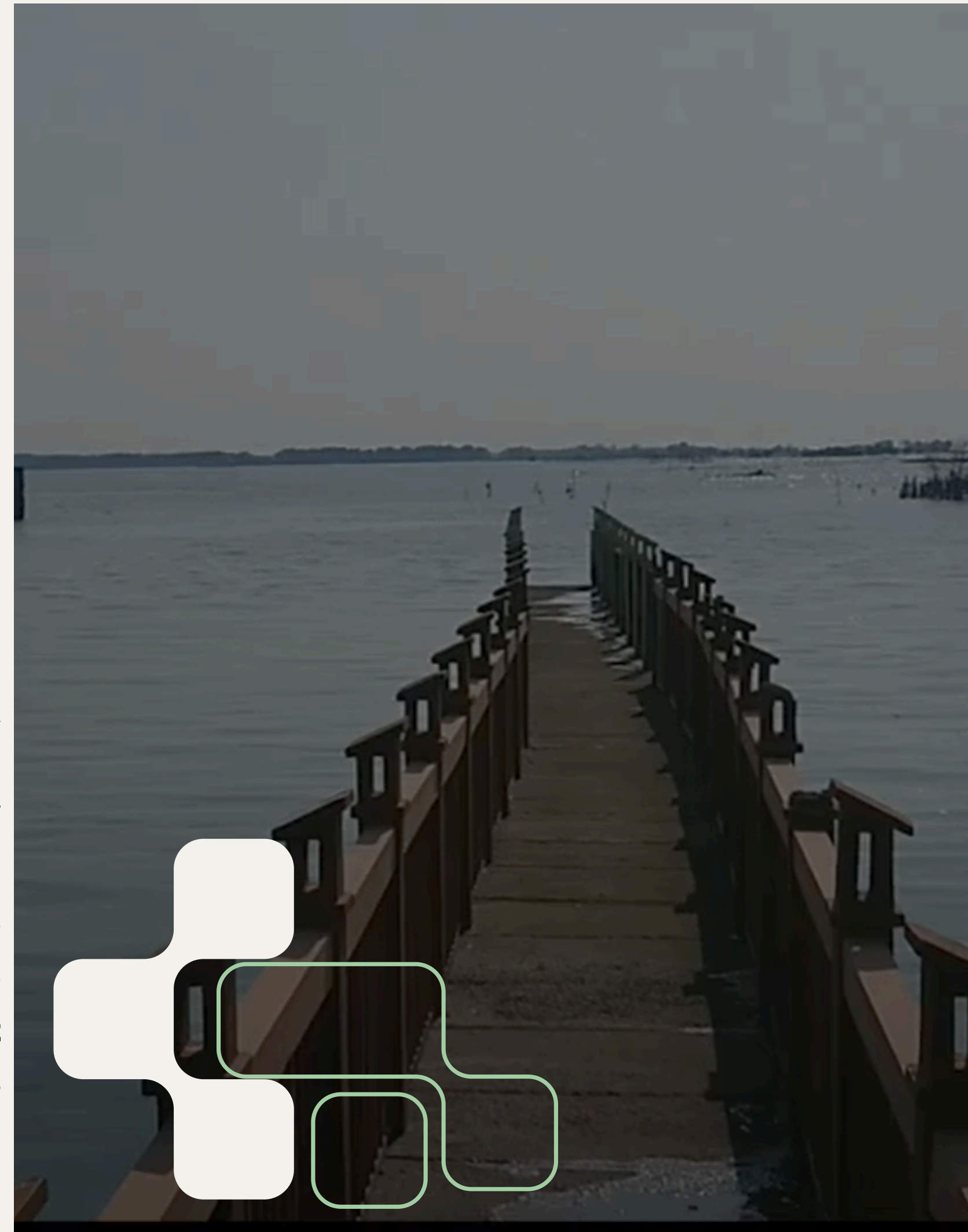
Perlu pelibatan Sekretariat POKJA PI Provinsi untuk berdiskusi, untuk membuat agenda dan event yang lebih jauh lagi untuk terus hadir dalam aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim termasuk dengan pembiayaan alternatif. Pemerintah daerah harus terus berkomitmen mengawal isu adaptasi perubahan iklim. Renja harus berhaluan pada adaptasi perubahan iklim.



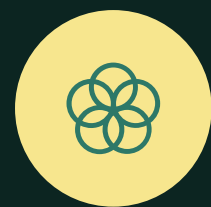
Dari enam sektor RAD Adaptasi di Kota Pekalongan, anggaran pada sektor pembangunan/penyesuaian dan pengelolaan infrastruktur untuk ketahanan banjir, serta sektor penyediaan bangunan/vegetasi pelindung pantai memiliki alokasi yang lebih tinggi dibandingkan empat sektor lainnya. Namun, jika dilihat sebaran per sektor, terdapat empat sektor yang memiliki kenaikan anggaran sejak tahun 2022 hingga 2024. Sektor penyediaan bangunan/vegetasi pelindung pantai naik dari 22,05 persen (2022) menjadi 28,38 persen pada tahun 2024. Sektor kedua, penyediaan infrastruktur air bersih yang adaptif berbasis masyarakat naik dari 1,20 persen (2022) menjadi 11,11 persen pada tahun 2024. Sektor ketiga terkait pengembangan sistem pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit terkait iklim naik dari 1,63 persen (2022) menjadi 8,95 persen pada tahun 2024. Sektor terakhir terkait pengembangan teknologi tepat guna untuk penyediaan air bersih naik dari 0,40 persen (2022) menjadi 3,58 persen pada tahun 2024. Perhitungan persentase tersebut berdasarkan jumlah anggaran masing-masing sektor terhadap total anggaran adaptasi dalam RAD API Kota Pekalongan. Namun sayangnya, belum ada anggaran responsif gender yang teridentifikasi dari analisis penandaan anggaran adaptasi Kota Pekalongan jika menggunakan perencanaan RAD API.



Untuk RAD API Provinsi Jateng, anggaran sektor kesehatan dan sektor air memiliki anggaran terbesar dan mengalami peningkatan, sedangkan tiga sektor lainnya justru mengalami penurunan. Anggaran kesehatan memiliki anggaran terbanyak yaitu sebesar 68,84 persen (Rp 611,040,154,000) pada tahun 2022, tahun 2023 sebesar 53,20 persen (Rp 526,092,562,000), dan 56,97 persen (Rp 449,540,426,000) pada tahun 2024. Sedangkan pada sektor air mengalami kenaikan dari 12,72 persen (Rp 112,938,091,100) pada tahun 2022 dan naik 23,38 persen (Rp 184,481,721,000) pada tahun 2024. **Selain itu terdapat peningkatan anggaran pada sektor kebencanaan dari 0,53 persen (Rp 4,735,000,000) pada tahun 2022 menjadi 1,54 persen (Rp 12,136,130,000) pada tahun 2024.**



REKOMENDASI



Penyelarasan sinergi dan aksi tingkat mikro dan tapak

Untuk menghindari ambiguitas sebaiknya disederhanakan namun dapat dilakukan dengan mendaftar lokasi aksi prioritas sehingga memudahkan OPD untuk menurunkan dalam Renja OPD.



Perkuat perencanaan pembangunan terkait adaptasi perubahan iklim

Salah satu cara untuk memperkuat dapat dilakukan dengan mensosialisasikan RAD API. Sosialisasi yang intensif dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dan memberikan masukan kepada pemerintah sesuai kebutuhan tingkat tapak.



Perumusan mekanisme untuk mengintegrasikan koordinasi antar tingkatan pemerintah.

Pembagian peran yang tertulis dalam dokumen perencanaan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan sehingga akan menciptakan ketahanan iklim di daerah.

REKOMENDASI



Memaksimalkan Efektivitas dan Implementasi RAD API

Pemerintah dapat menggunakan pendekatan tematik atau sub tema terkait adaptasi perubahan iklim. Tema/sub tema tersebut dapat diintegrasikan dalam tema besar RKPD setiap tahun sehingga lebih mudah juga untuk dipantau oleh Pokja API Kota Pekalongan.



Menyusun Dokumen Strategi Implementasi

Dokumen tersebut dapat memuat case cading isu dari RAD-RPJMD-RKPD-Renja OPD, sumber anggaran, waktu pelaksanaan, skema pelaporan dan mekanismemonitoring evaluasi. Keberadaan dokumen tersebut akan memudahkan Pokja API maupun masyarakat lainnya untuk terlibat dalam pelaksanaan RAD API.



Koordinasi Terkait Intervensi yang Belum Berjalan

Keberadaan koordinasi dan sinkronisasi aksi adaptasi sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan aksi adaptasi. Pembagian peran juga akan berdampak tidak hanya untuk Kota Pekalongan namun untuk kabupaten/kota lainnya yang berada di Provinsi Jawa Tengah.